

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pendidikan

1. Pengertian Manajemen Pendidikan

Menurut Muhaimin, 2008 manajemen pendidikan merupakan rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dikaitkan dengan bidang pendidikan.¹ Menurut Husaini Usman manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.² Menurut Nawawi manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan berupa rangkaian kegiatan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan sistematis dalam lingkungan tertentu terutama pendidikan formal.³

Dari pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal dan menggunakan prinsip manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen Pendidikan

Menurut George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* fungsi manajemen pendidikan dibagi menjadi berikut:

¹ Rohmah dan Zaenal Fanani, *Pengantar Manajemen Pendidikan*, 4.

² Husaini Usman, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: PPs, 2004), 8.

³ Muhammad Kristiawan, Dian Safitri, dan Rena Lestari, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 5.

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu kegiatan dalam penetapan aktivitas yang berhubungan dengan pertanyaan 5W1H yaitu: apa (*what*) yang akan dilakukan, mengapa (*why*) hal tersebut dilakukan, siapa (*who*) yang melakukannya, di mana (*where*) melakukannya, kapan (*when*) dilakukan, dan bagaimana (*how*) melakukannya. Perencanaan adalah suatu proses penetapan tujuan yang akan dicapai guna memutuskan strategi dan taktik untuk mencapainya. Perencanaan sekolah harus luwes, mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjadi penjabar dari tahap-tahap yang dikehendaki dengan melibatkan sumber daya dalam pembuatan keputusan. Tujuan rencana sekolah membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekolah sekarang dan masa mendatang.⁴

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yaitu aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen, dan menghasilkan penataan dari karyawan. Pengorganisasian berhubungan dengan pembagian tugas yang akan mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan.⁵

3. Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah upaya yang menjadikan perencanaan dan pengorganisasian menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap staf dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggungjawabnya. Pelaksanaan mempunyai arti dan peranan yang sangat penting. Sebab di antara fungsi manajemen lainnya, penggerakan merupakan fungsi secara langsung berhubungan dengan manusia (pelaksana).⁶

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu

⁴ Rohmah dan Zaenal Fanani, *Pengantar Manajemen Pendidikan*, 25.

⁵ Rohmah dan Zaenal Fanani, 23.

⁶ Rohmah dan Zaenal Fanani, 57.

kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Koontz pengawasan adalah koreksi pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana.⁷

Dalam pengawasan terdapat dua indikator utama yang menunjang, yaitu antara lain:

1) Monitoring

Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi terkait pelaksanaan program. Monitoring pada umumnya dilakukan baik pada waktu sebelum kegiatan dan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan. Fungsi monitoring yaitu mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati dalam menganalisa semua hasil pemantauan untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan.⁸

2) Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan dan telah berjalan dalam suatu periode, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan. Misalnya disekolah, untuk satu caturwulan atau enam bulan atau satu tahun pelajaran. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.⁹

3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Pendidikan

Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Machali (2012: 125) antara lain:

- a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif,

⁷ Koontz, *Management Function and Strategy* (Tokyo: Mc. Graw Hill Kogakusha, 1980), 65.

⁸ Soewardi Lazaruth, *Kepala Sekolah Dan Tanggung Jawab*, (Salatiga: Kanisius, 1994), 53.

⁹ Lazaruth, 67.

inovatif, kreatif, dan efektif.

- b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
- c. Terpenuhinya salah satu dari empat kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial).
- d. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
- e. Terbekalnya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan.
- f. Teratasinya masalah mutu pendidikan.
- g. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel serta, meningkatnya citra pendidikan yang positif.¹⁰

B. Kurikulum Pendidikan

1. Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum telah mengalami perubahan. Perubahan orientasi, desain, model dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional serta menyetarakan sistem pendidikan yang ada di dunia. Adapun sejarah kurikulum di Indonesia yaitu:

a. Masa Orde Lama (1945 – 1965)

1) Kurikulum 1947, “Rentjana Pelajaran 1947”

Pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang dinamakan yaitu kurikulum 1947 istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut “*leer plan*” artinya rencana pelajaran. Konsep kurikulum Rentjana pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran dikelas. Dengan demikian bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang

¹⁰ Kristiawan, Safitri, dan Lestari, *Manajemen Pendidikan*, 8.

akan diperoleh peserta didik baik dalam kelas maupun luar kelas.

2) Kurikulum 1952 “Rentjana Pelajaran Terurai 1952”

Kerangka kurikulum 1952 reatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kehidupan nyata di masyarakat (tematik) menjadi hal yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri khas kurikulum 1952. Dalam konteks Rentjana Pelajaran Terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi, yaitu: moral, kecerdasan, emosionalistik/artistik, keterampilan, jasmani.¹¹

3) Kurikulum 1964 Rentjana Pendidikan 1964

Konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu, hari krida ditetapkan pada hari sabtu oleh pemerintah. Hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga dan berbagai bentuk permainan.¹²

b. Masa Orde Baru (1966-1998)

1) Kurikulum 1968

Sifat kurikulum ini digambarkan sebagai hasil dari pemerintahan “Orde Lama” yaitu bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Perubahan dari pancawardana menjadi

¹¹ Alhamuddin, *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2019), 48.

¹² Alhamuddin, 49.

pembinaan jiwa pancasila terjadi pada kurikulum 1968. UUD 1945 menjadi pedoman dalam penerapan kurikulum ini secara murni dan konsekuen.¹³

2) Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum 1975 banyak mendapatkan kritik dari pelaksana di lapangan. Guru dituntut menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Seperti adanya sistem penilaian guru pada setiap akhir satuan pembelajaran.

3) Kurikulum 1984 Kurikulum 1975 yang Disempurnakan

Pada kurikulum ini subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini yang dinamakan aktif *learning* karena siswa selalu aktif dalam pembelajaran seperti mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Banyak sekolah yang menerapkan dengan baik tetapi ada beberapa siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas.¹⁴

4) Kurikulum 1994

Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.¹⁵

c. Masa Revormasi (1999 – Sekarang)

1) Kurikulum 2004, “KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)”

¹³ Alhamuddin, 52.

¹⁴ Alhamuddin, *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi*, 57.

¹⁵ Alhamuddin, “Sejarah Kurikulum Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum,” *Jurnal 1* (2014).

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab.¹⁶ Ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi menurut Depdiknas (2002) yaitu: memperhatikan apa yang sudah diperoleh siswa selama dilaksanakan KBM, hasil akhir dari sebuah pembelajaran yaitu mempunyai keterampilan, metode pembelajarannya bervariasi, sumber belajar tidak hanya mengandalkan guru saja.¹⁷

2) Kurikulum 2006, “KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)”

KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi dan penambahan dari standar yang sudah di buat pemerintah, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan sampai pengembangan silabus.¹⁸

3) Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap anak didik secara keseluruhan. Kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan sikap ditentukan oleh rapor sebagai penentuan kenaikan kelas dan kelulusan anak didik. Meningkatkan proses dan hasil belajar untuk pembentukan budi pekerti dan berakhlak mulia adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013.¹⁹

4) Kurikulum Merdeka Belajar

Pada kurikulum merdeka guru memiliki keleluasaan

¹⁶ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 154.

¹⁷ Herman Zaini, “Karakteristik Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),” *Jurnal Idaroh* 1 (t.t.): 15.

¹⁸ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 127.

¹⁹ Arif Munandar, *Pengantar kurikulum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 58.

untuk memilih dan memodifikasi berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Merdeka belajar merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah dengan tujuan mencetak generasi pendidikan yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Dalam kurikulum merdeka belajar terdapat istilah pembelajaran dengan pemahaman baru, hal ini bukan berarti mengadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun berupaya untuk memastikan seluruh praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik.²⁰

2. Pentingnya Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar

Berbagai studi nasional hingga internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang cukup lama. Studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Keadaan ini semakin parah akibat menyebarnya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka perlu melakukan perubahan yang sistemik, salah satunya dengan perubahan kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya pemulihan krisis pembelajaran.²¹

3. Fungsi Manajemen Pada Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam pusat asesmen dan pembelajaran, badan penelitian dan pengembangan perbukuan mengemukakan:

²⁰ Windayanti Windayanti dkk., "Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka," *Journal on Education* 6, no. 1 (5 Juni 2023): 2056–63, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3197>.

²¹ *Buku Saku: Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*, 10.

a. Perencanaan Kurikulum Merdeka Belajar

Adapun tahapan perencanaan penerapan kurikulum merdeka belajar antara lain:

- 1) Menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik, serta satuan pendidikan.
- 2) Perencanaan dalam asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik.
- 3) Mengembangkan Modul Ajar.
- 4) Penyusunan Pembelajaran dengan Tahap Capaian dan Karakteristik Peserta Didik.
- 5) Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Asesmen Formatif dan Sumatif.
- 6) Pelaporan Hasil Belajar.
- 7) Evaluasi Pembelajaran dan Asesmen.²²

b. Pengorganisasian Kurikulum Merdeka Belajar

Untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka, pengorganisasian pembelajaran perlu diperbarui. Yaitu mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Adapun pembagian kewenangan:

- 1) Kewenangan Pemerintah Pusat.
 - a) Struktur kurikulum.
 - b) Profil Pelajar Pancasila.
 - c) Capaian Pembelajaran.
 - d) Prinsip pembelajaran dan asesmen.
- 2) Kewenangan Satuan Pendidikan
 - a) Visi, misi, dan tujuan sekolah.
 - b) Kebijakan lokal terkait kurikulum.
 - c) Proses pembelajaran dan asesmen.
 - d) Pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan

²² Pusat Asesmen dan Pembelajaran, *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)* (Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, 2021), 16.

e) Pengembangan perangkat ajar.

c. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam hal ini yang menjadi pelaksanaan kurikulum merdeka belajar terkait asesmen formatif, dan sumatif.

1) Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

a) Dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran.

b) Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa (kinerja, produk, proyek, portofolio), maupun tes.

c) Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik.

d) Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar ceklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung.

2) Pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

a) Sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester.

b) Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa (kinerja, produk, proyek, portofolio), maupun tes.

c) Hasil sumatif dapat ditindak lanjuti dengan memberikan umpan balik pada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan.²³

d. Pengawasan Kurikulum Merdeka Belajar

Pengawasan dalam proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran,

²³ Pusat Asesmen dan Pembelajaran, 57.

pelaporan hasil pengawasan.²⁴ Pengawasan oleh kepala sekolah berfokus pada keseluruhan proses pembelajaran. Hasil pengawasan disusun dalam bentuk laporan sebagai tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Tindak lanjut hasil pengawasan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk:

- 1) Perbaikan rencana dan pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan rencana dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.
- 2) Pendampingan teknis kepada pendidik yang memerlukan konsultasi dan dukungan lain untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan dalam proses pembelajaran.
- 3) Penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan kinerja yang baik.
- 4) Proses interaktif dalam penyampaian inovasi praktik baik dalam pelaksanaan pembelajaran.
- 5) Penguatan dan pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.²⁵

²⁴ Kemendikbudristek, *Permendikbud 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2016).

²⁵ Kemendikbudristek, 11.